

Analisis K.A.P (Knowledge, Attitude, Practices) APP / APL di Kabupaten Bone

Januari 2016

Studi Akhir untuk

Program Mentorship



MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan



Januari 2016

Pelaksanaan studi dengan menggunakan parameter K.A.P ini dijalankan untuk APP/APL Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Program MAMPU yang dilaksanakan oleh BaKTI dengan dukungan LPP Bone sebagai mitra lokal. Kegiatan studi ini dilaksanakan oleh *Trias H. Utomo* dan *Rokhmad Munawir* sebagai konsultan.

Daftar Isi

Abstraksi	1
Bab I. Catatan Umum	3
Bab II. Catatan Pelaksanaan	4
1. Metodologi.....	4
2. Pemilihan Sampel	5
3. Rekam Proses	5
Bab III. Catatan Analisis Individu	6
1. APP/APL	6
a. Abulkhhaeri (Ketua Fraksi Nasdem/Komisi II: Ekonomi dan Keuangan).....	6
b. Efendi (Ketua Fraksi Keadilan Persatuan, PKS).....	9
c. Andi Yusuf Akbar (Sekretaris Fraksi Golkar)	12
d. Ir. Bahtiar Mala (Ketua fraksi PNBK)	15
e. H. Kaharudin (Wakil Komisi 2 DPRD, F Demokrat)	18
f. Andi Samsidar Ishak (Wakil Ketua DPRD, Gerindra), Hj. Mintayu Samsudin (Fraksi Golkar), dan Suharni (Fraksi Nasdem)	21
g. Drs Andi Taufiq Kadir (Wakil Ketua DPRD, Nasdem).....	26
h. Andi Muh Saiful (Fraksi PPP)	29
i. Syamsul Bahri (Anggota Golkar).	29
j. Rusdi (Anggota DPRD PNBK).	31
2. Perspektif Perwakilan SKPD.....	33
3. Perspektif Kelompok Konstituen	35
4. Perspektif Kelompok Media	36
Bab IV. Catatan Akhir	38
1. Kesimpulan	38
2. Rekomendasi	39
Lampiran	40
Klasifikasi Pertanyaan K.A.P (Knowledge, Attitute and Pratices)	40

Abstraksi

Studi ini adalah bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi akhir yang berkaitan dengan pengetahuan/knowledge, sikap/attitude dan praktek/practices (K.A.P) atas fungsi-fungsi keparlemenan serta isu-isu pemberdayaan perempuan terutama 5 fokus program MAMPU oleh APP/APL mitra.

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Proses penilaian melalui scoring tidak dilakukan dengan pertimbangan bahwa informasi yang dihasilkan lebih pada potret diri masing-masing APP/APL mitra tanpa memberikan justifikasi baik atau buruk. Penilaian akan dilakukan nanti pada akhir program mentorship dalam studi akhir (end-line study) dengan membandingkan pernyataan atas pertanyaan yang sama secara substantif di masing-masing elemen (qualitative comparative analysis). Oleh karena itu, hasil pokok studi tahap ini adalah gambaran perubahan K.A.P masing-masing APP/APL di masing-masing isu. Beberapa APP/APL menunjukkan adanya perubahan yang signifikan bila dibandingkan pada saat *baseline study* (April 2015). Adanya perubahan ini tidak hanya karena kegiatan *mentorship* tetapi dimungkinkan juga karena semakin intensifnya APP/APL mitra program berinteraksi dengan *stakeholder* lain baik dengan anggota dewan yang lain, SKPD, media dan kelompok konstituen.

NO	Nama APP/APL Mitra	POSISI	STATUS
1	Abulkhhaeri	Ketua Fraksi Nasdem)	Baru
2	Efendi	Ketua Fraksi Keadilan Persatuan, PKS	Baru
3	Andi Yusuf Akbar*	Sekretaris Fraksi Golkar	Baru
4	Ir. Bahtiar Mala*	ketua fraksi PNBK	Baru
5	H. Kaharudin*	Wakil Komisi 2 DPRD, F Demokrat	Petahana
6	Hj. Mintayu Samsudin*	Fraksi Golkar	Baru
7	Suharni	Fraksi Nasdem	Baru
8	Andi Samsidar Ishak*	Wakil Ketua DPRD, Gerindra	Baru
9	Drs Andi Taufiq Kadir	Wakil Ketua DPRD, Nasdem	Baru
10	Andi Muh Saiful	Fraksi PPP	Petahana
11	Syamsul Bahri	Anggota Golkar	Baru
12	Rusdi*	Anggota DPRD PNBK	Baru

*APP/APL dengan perubahan signifikan  APL hanya terlibat dalam baseline

Selain wawancara dengan APP/APL mitra, studi ini juga berupaya mendapatkan informasi secara berimbang dengan melakukan juga wawancara dengan perwakilan SKPD, kelompok konstituen serta kelompok media. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi atau verifikasi atas pernyataan yang telah didapat dari APP/APL sebelumnya.

Studi ini akan menyampaikan analisa perubahan setiap individu APP/APL mitra dan di bagian akhir akan menyampaikan kesimpulan secara umum menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi keparlemenan termasuk fungsi representasi dan interaksi dengan stakeholder lain dijalankan oleh mentee. Rekomendasi yang disampaikan adalah bersifat umum tidak dirinci untuk masing-masing APP/APL, dalam kaitan dengan materi dan metode *mentorship* dilaksanakan.

Bab I. Catatan Umum

BaKTI fokus pada Pendekatan Penguatan Parlemen dari Program MAMPU - BaKTI, yaitu bekerja sama dengan anggota parlemen; parlemen perempuan, kaukus perempuan, dan anggota parlemen laki-laki yang mendukung advokasi gender, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Program MAMPU-BaKTI adalah “Penguatan Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan dalam Memperjuangkan Kebijakan yang Berpihak pada Perempuan dan Masyarakat Miskin pada 5 (lima) tema isu MAMPU” yaitu:

1. Meningkatkan akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial.
2. Meningkatkan akses perempuan kepada pekerjaan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja.
3. Memperbaiki untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri.
4. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi.
5. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Saat ini sampai pada tahun ketiga program berjalan (Fase 1), BaKTI bekerja di 5 provinsi dan bekerjasama dengan mitra di daerah yaitu sub office BaKTI di Nusa Tenggara Barat mencakup Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Di Sulawesi Selatan yaitu LPP Bone di kabupaten Bone, LP2EM Parepare di kota Parepare, YKS di Kabupaten Tana Toraja dan MAUPE di kabupaten Maros. Kemudian dengan RPS Sultra di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Arika Mahina di kota Ambon (Maluku) dan PPSE-KA di kabupaten Belu.

Secara khusus, program Mentorship ini dilakukan secara piloting pada 2 kabupaten/kota yaitu kota Ambon di Maluku dan kabupaten Bone di Sulawesi Selatan.

Program MAMPU-BaKTI bekerja melalui kaukus parlemen perempuan nasional dan lokal, anggota parlemen perempuan dan laki-laki yang mendukung isu gender yang akan berusaha untuk mempercepat reformasi di tingkat kebijakan yang terkait dengan 5 tema tersebut. Hasil yang diharapkan adalah anggota parlemen perempuan dan anggota parlemen pria lebih peka terhadap isu gender karena memiliki pemahaman yang lebih jelas atas peran mereka dan memiliki kecakapan untuk memajukan, membela, dan terlibat dalam proses menuju realisasi aspirasi konstituen mereka, terutama kaum miskin. Penguatan kapasitas anggota parlemen perempuan melalui pelatihan, *mentoring*, studi banding dan metode lain tentang tupoksi (legislasi, gender budgeting dan pengawasan), pemahaman peraturan yang terkait tupoksi, *public speaking*, penguatan perspektif mengenai tema MAMPU beserta peraturan terkait.

Sebagai upaya melihat perubahan anggota parlemen dari sisi pengetahuan, sikap dan perilaku serta praktek-praktek dalam fungsi keparlemenannya maka studi K.A.P ini dilakukan sebagai basis awal (*baseline*) memahami anggota parlemen sebagai mitra program. Oleh karena untuk melihat sebuah perubahan,

maka studi akhir ini (*endline*) dilakukan setelah program penguatan kapasitas APP/APL dilaksanakan.

Hasil analisa perubahan APP/APL mitra ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai salah satu input dalam penyusunan strategi program *mentorship* paska *pilot project* yang melibatkan APP/APL lebih luas sebagai mitra.

Bab II. Catatan Pelaksanaan

1. Metodologi

Sebagai bagian dari program *mentorship*, maka instrumen analisis ini dibangun dalam rangka melihat perubahan individu APP/APL mitra dimana telah dipahami bahwa unsur suatu perubahan adalah adanya pengetahuan yang mampu memberikan keyakinan dan motivasi untuk bersikap serta berperilaku seperti yang diharapkan. Dalam praktek, perubahan ini pun akan juga dipengaruhi oleh adanya sarana yang menunjang serta berlakunya norma atau kebijakan yang memungkinkan adanya perubahan yang lebih baik.

Dengan pertimbangan tersebut maka parameter K.A.P (*Knowledge, Attitude and Practices*) dipilih sebagai basis analisis memahami kapasitas individu APP/APL mitra. Pendekatan ini nantinya akan dilaksanakan ulang di akhir program sebagai pembandingan dengan pendekatan *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) untuk melihat perubahan selama kurang lebih 8 bulan pelaksanaan kegiatan *mentorship*. Data berupa tanggapan para mitra tidak dimasukkan ke dalam skala dengan pertimbangan bahwa **pengetahuan** (*knowledge*) tidak bisa dijenjangkan, untuk **sikap** (*attitude*) ketika dikemas ke dalam skala maka jawaban narasumber akan cenderung normatif dan untuk **praktek** (*practices*) akan dikonfirmasi sumber verifikasinya. Oleh karena itu, perbandingan nantinya akan melihat apakah ada perbedaan pernyataan secara substansi atas pertanyaan yang sama paska *mentorship*.

Untuk mendukung strategi pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) yang menonjolkan kesetaraan peran, konsep diri (*self-determination & self-direction*) serta materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan atas peran sosial peserta maka studi ini tidak dalam tujuan untuk memberikan penilaian (skor) individu tetapi lebih untuk melihat perubahan mitra program *mentorship* dihubungkan dengan kinerjanya sebagai APP/APL.

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, maka studi ini dilaksanakan untuk membandingkan jawaban sehingga dapat mengidentifikasi perubahan sebelum dan sesudah pendampingan berkaitan dengan pertanyaan:

- a) Bagaimana pengetahuan, sikap dan praktek atas fungsi keparlemenan dan pemberdayaan perempuan yang dimiliki oleh APP/APL?
- b) Bagaimana perwakilan SKPD, kelompok komunitas dan media melihat pengetahuan, sikap dan praktek atas fungsi keparlemenan dan pemberdayaan perempuan yang dimiliki oleh APP/APL?

2. Pemilihan Sampel

Rancangan studi ini adalah melibatkan 25 orang sebagai narasumber dengan rincian 12 orang sebagai APP/APL mitra, 3 orang dari LSM, 3 orang dari media, 5 orang dari kelompok konstituen dan 2 orang dari SKPD setempat.

Pemilihan narasumber yang terlibat dalam studi ini telah oleh BaKTI dan LPP Bone sebagai lembaga mitra lokal dengan menggunakan metode *quota sampling*.

Pemilihan dengan menggunakan pola ini adalah lebih karena pertimbangan efektivitas pencapaian tujuan program. Pemilihan dilakukan dengan kriteria bahwa APP/APL yang akan dilibatkan adalah orang-orang yang telah terlibat sebelumnya di program MAMPU-BaKTI dengan harapan pada teknis pelaksanaannya nanti tidak akan menemui kesulitan untuk membangun komitmen terutama ketika menyepakati rencana tindak lanjut paska program.

3. Rekam Proses

Kegiatan wawancara dengan para narasumber dilakukan pada tanggal 17-22 Januari 2015. Proses wawancara rata-rata membutuhkan waktu 1 jam. Dari 12 narasumber yang ditargetkan, terdapat 3 mentee yang tidak diwawancara oleh peneliti tetapi oleh staf mitra lokal program, yaitu Abulkhaeri dan Suharni. Untuk Andi Muh.Saiful belum dapat dihubungi dengan alasan kesehatan. Diantaranya adalah APL petahana sehingga mampu memberikan penjelasan lebih lengkap dengan mengacu pada pengalaman yang bersangkutan pada periode kerja sebelumnya.

Tantangan yang muncul dalam proses menggali informasi terutama dengan APP/APL adalah jawaban normatif dan lebih pada usaha menampilkan figur ideal wakil rakyat daripada menyampaikan praktek nyata selama pelaksanaan program.

Bab III. Catatan Analisis Individu

1. APP/APL

a. Abulkhhaeri (Ketua Fraksi Nasdem/Komisi II: Ekonomi dan Keuangan)

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Dalam hal fungsi representasi yaitu menyerap aspirasi masyarakat, pernyataan awal menunjukkan bahwa dialog dengan konstituen sudah dilakukan tetapi masih dalam konteks kunjungan kerja komisi. Saat ini, *mentee* menyatakan bahwa pertemuan informal dengan konstituen sudah sering dilakukan. *Mentee* sudah merasakan manfaatnya yaitu warga dapat lebih terbuka dan bebas dalam berdiskusi. Berbeda dengan pertemuan formal maupun masa reses yang terkadang warga yang hadir tidak terbuka atau lebih banyak didominasi hanya oleh beberapa orang saja. *Mentee* menyatakan bahwa kedekatan dengan warga sangat membantu terutama dalam kaitan menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan dalam arti luas, tidak terbatas pada komisi dimana *mentee* ditempatkan.

April 2015	Januari 2016
<i>"...sudah pernah melakukan 5 kali reses perorangan, tetapi itu semuanya karena (saya) berada di komisi 2"</i>	<i>"...saya sekarang lebih sering ketemu warga, mereka lebih terbuka. Saya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan bersama masyarakat."</i>

Dalam fungsi legislasi, pernyataan awal menunjukkan adanya asumsi bahwa ketika anggota parlemen menjalankan fungsi legislasi, tidak akan tampak bahwa APP/APL tersebut telah bekerja karena fungsi ini tidak membawa manfaat langsung kepada konstituen mereka. *Mentee* belum mampu memberikan penjelasan secara jelas proses penyusunan suatu peraturan daerah, bahkan untuk suatu pemahaman awal tentang proses pembuatan kebijakan, misalnya pemahaman mengenai tata urutan perundangan atau dalam hal penerapan pendekatan keadilan *gender* dan bagaimana konsultasi publik dalam proses pembuatan suatu kebijakan, *mentee* belum menunjukkan pemahaman yang matang.

Saat ini, *mentee* menyampaikan bahwa dalam hal legislasi, fungsi DPRD adalah melakukan pembahasan dan penetapan perda dengan eksekutif. Penjelasan mengenai proses penyusunan perda dapat disampaikan meskipun tidak terlalu detail dan rinci.

April 2015	Januari 2016
<p>“Fungsi legislasi itu tentunya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten membuat undang-undang.... belum seluruh kebijakan responsif gender, untuk mengenai isu gender itu ada di komisi 4.....usulan perda disampaikan ke kita kemudian dibentuk pansus, ada satu ada pansus dua, kita bahas masing-masing bidang kemudian sesudah itu kita adakan konsultasi di instansi tingkat propinsi sesudah itu ditetapkan”</p>	<p>“salah satu fungsi dan tugas DPR/DPRD bersama eksekutif adalah membahas dan menetapkan UU/Perda”</p>

b) Relasi dengan Media

Mentee sejak awal menyadari peran media tidak sebatas untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat tetapi sekaligus memberitakan keluhan kelompok masyarakat berkaitan kinerja pelayanan publik. Penjelasan mengenai bagaimana membina relasi belum mampu diuraikan dengan rinci dan jelas. Kegiatan dengan melibatkan jurnalis sementara ini lebih mengandalkan dukungan dari bagian humas, artinya belum memiliki strategi khusus sebagai individu anggota parlemen.

Ketika studi akhir ini dijalankan, *mentee* lebih banyak melakukan komunikasi langsung meskipun masih lebih banyak dilakukan melalui telepon terutama berkenaan ketika akan ada kegiatan ke lapangan bertemu konstituen. *Mentee* lebih banyak menghubungi jurnalis dari media cetak, belum media elektronik atau media alternatif. Hal ini tercermin pada saat ditanyakan media yang sering dihubungi, *mentee* menyebut nama-nama media cetak lokal (koran harian).

April 2015	Januari 2016
<p>“Secara khusus saya tidak punya (strategi), hanya untuk hal-hal tertentu kita di sekretariat humas. Untuk jenis media saya juga menggunakan BBM”</p>	<p>“Saya seringnya ya... kontak wartawan koran saja...”</p>

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Secara umum, pernyataan *mentee* masih sama bahwa program-program yang ada saat ini belum secara khusus menyasar kaum perempuan dan hal ini sebenarnya mensyaratkan peraturan lokal agar pelaksanaannya lebih terukur.

Hal lain yang mengemuka ketika studi akhir ini dijalankan dan hal ini sangat disayangkan adalah *mentee* tidak dapat menjawab kegiatan strategis seperti apa yang harus dilakukan ketika berkaitan dengan tema utama MAMPU.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Akses perempuan pada program perlindungan sosial</u> <i>"...perlu membuat aturan yang jelas, kita akan mendorong membuat peraturan daerah, tetapi saya juga belum bisa pastikan...."</i></p>	<p><u>Akses perempuan pada program perlindungan sosial</u> <i>"...pemantauan dan diskusi dengan penerima manfaat... ya saya rasa melibatkan mereka dalam kegiatan strategis..., apalagi sudah ada KIS, kartu pintar...BLT."</i></p>
<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>"Sebetulnya pemerintah kabupaten sudah menargetkan 5000 lapangan kerja, nah itu termasuk di dalamnya perempuan."</i></p>	<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>"Perlu adanya regulasi local dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan serta mendorong perempuan dalam kegiatan yang lebih strategis."</i></p>
<p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> <i>"Kemarin kita sudah bicarakan, masalahnya UU-nya khususnya perempuan ini ada yang belum dilimpahkan ke pihak kabupaten salah satunya mengenai pelatihan atau pembekalan untuk TKW."</i></p>	<p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> <i>"ada hambatan banyak program selalu berasal dari pusat, kebijakan di pusat. Selain itu perlu peningkatan keterampilan kepada calon tenaga kerja yang akan ke luar negeri."</i></p>
<p><u>Pengurangan kekerasan dan perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>"...semua ini berkaitan dengan banyaknya pernikahan usia dini, sering kita cegah tetapi tetap saja dilakukan"</i></p>	<p><u>Pengurangan kekerasan dan perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>"...perlu peningkatan alokasi anggaran yang berhubungan dengan sarana prasarana kesehatan..."</i></p>
<p><i>"saya kira semua belum optimal, salah satunya bisa dilihat dari belum adanya aturan. Barangkali ini terkait masalah waktu, karena kemarin kita baru efektif bekerja di bulan Agustus, belum lagi masalah-masalah di dewan ini...ada keterlambatan pembentukan alat kelengkapan..."</i></p>	

d) Integrasi program dengan pihak lain

Hubungan dengan LSM terutama LPP Bone sudah mulai menunjukkan peningkatan, terutama dalam pembahasan APBD. Sementara dengan SKPD memang baru dimulai dengan SKPD yang menjadi mitra kerja komisi dimana *mentee* ditempatkan.

April 2015	Januari 2016
<i>“Betul memang itu penting semua. Ke depan dengan pihak SKPD ya tentu kita akan selalu berkomunikasi, dengan LSM tentunya juga dibangun komunikasi, tetapi masalahnya banyak juga LSM yang kita khawatirkan hanya cari duit.”</i>	<i>“ya kita diajak dan mengajak mereka... terutama LPP...kami sering dengan mereka diskusi anggaran.”</i>

b. **Efendi (Ketua Fraksi Keadilan Persatuan, PKS).**

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Dalam fungsi legislasi, *mentee* sejak awal sudah mampu memberikan penjelasan normatif bagaimana fungsi legislasi harus dijalankan namun juga mengakui bahwa untuk periode parlemen yang baru ini belum melahirkan inisiasi ranperda.

Perubahan yang muncul adalah *mentee* mampu menjelaskan urutan pembuatan raperda yakni dari keberadaan naskah akademik yang diajukan eksekutif dan kemudian dibahas dalam pansus. Sampai dengan studi akhir ini dilaksanakan, *mentee* terlibat dalam Pansus Raperda Dana Cadangan Pilkada dan Raperda Retribusi Jasa Umum.

Dalam kerangka fungsi lain, yaitu pengawasan, sejak awal *mentee* sudah mampu menjelaskan dengan rinci bagaimana idealnya fungsi ini dijalankan termasuk bagaimana konsekuensi tindak lanjut terhadap SKPD sebagai mitra kerja bila ada temuan. Perubahannya, *mentee* menyatakan telah melibatkan konstituennya, terutama saat kunjungan ke lapangan baik reses maupun kunjungan kerja komisi. Masukan dari masyarakat dijadikan sebagai bahan untuk membahas/memanggil SKPD.

April 2015	Januari 2016
<i>“Hambatan terberat yang saya dapatkan itu harapan-harapan masyarakat yang sangat besar yang melampaui tugas bidang kita...”</i>	<i>“...beberapa kali kunjungan bersama komisi saya meminta pendapat dan masukan masyarakat terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan. Itu dasar saya rapat dengan SKPD. Pengawasan kami bukan pengawasan teknis. “</i>

b) Relasi dengan Media

Mentee menyadari peran media memang penting baik untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat maupun sebaliknya pemberitaan tentang keluhan kelompok masyarakat. Dalam prakteknya, *mentee* masih belum banyak melakukan hubungan dengan media massa, hubungan dengan media massa masih menjadi bagian pimpinan dewan dan pimpinan komisi. Namun demikian, *mentee* menyebutkan bahwa beberapa kali melakukan diskusi informal dengan wartawan tanpa target untuk diberitakan.

Artinya bahwa dalam konteks relasi dengan media, *mentee* belum melihat kemanfaatan dari kegiatan yang berhubungan dengan media massa.

April 2015	Januari 2016
<p>“Secara umum saya belum mengajak kerjasama sebuah media. Disini media masuk dan berkomunikasi dengan humas. Saya tidak perlu pencitraan, kalau media merasa saya layak diliput, ya silahkan saja. Apakah itu dari segi positif atau negative, itulah resiko saya”</p>	<p>“.... dalam tatib kami disebutkan bahwa yang berhak menjadi jubah hanya pimpinan.”</p>

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Program-program yang ada saat ini dalam kaitan tema utama program MAMPU, secara umum menurut *mentee*, upaya untuk memberikan akses bagi para perempuan terutama perempuan miskin dalam jaminan perlindungan social masih belum cukup. Kendalanya diantaranya adalah kegiatan-kegiatan masih selalu bergantung pada program pusat dan belum ada kebijakan pada tingkat daerah untuk implementasinya. Misalnya kebijakan Jaminan Kesehatan dan beras untuk masyarakat miskin yang masih bergantung dari pusat. Daerah belum memiliki kebijakan pendukungnya. Beberapa tema utama belum mengerucut pada kaum perempuan. Perubahan yang tampak adalah pernyataan *mentee* sudah lebih konkrit bila dibandingkan dengan pernyataan yang bersangkutan pada saat studi awal.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> “...secara pribadi, saya sangat mendukung perempuan itu lebih produktif, tetapi lebih mendukung lagi kalau kegiatannya itu dikerjakan di rumah”</p>	<p><u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> “...saya sangat mendukung pemberdayaan perempuan terutama para perempuan miskin, namun sayangnya selama ini program kita masih bergantung dari pusat.”</p>
<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u></p>	<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u></p>

April 2015	Januari 2016
<p>“Jadi banyak juga sebenarnya eksekutif sudah kerjakan yang sangat didukung oleh legislatif tetapi dalam perjalannya ternyata obyeknya itu atau orangnya itu sebenarnya yang tida menunjukkan ciri-ciri bahwa dia mau berubah.”</p> <p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> “...kalau persoalan TKW tentu kita tidak bisa mencampuri, artinya itu kan tentu ada semaam regulasi yang mengatur antara negara kita dan luar negeri. Tetapi yang perlu kita pikirkan disini bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga TKW yang profesional.”</p> <p><u>Pengurangan kekerasan dan perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “...untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan saya tidak bisa jawab daripada nanti mengarang-ngarang karena memang saya belum punya pengalaman ke sana”.</p>	<p>“...menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi dan sekolah-sekolah seperti SMK mendapatkan keterampilan lebih banyak.”</p> <p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> “...adanya pelatihan sebelum berangkat ke luar negeri, seharusnya BLK dapat lebih optimal...”</p> <p><u>Pengurangan kekerasan dan perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “...puskesmas lebih optimal sosialisasinya dan perlu melihat situasi lapangan seingga lebih tepat sasaran... ini sudah saya coba ketika reses berdiskusi dan mengajak kader desa...”.</p>

d) Integrasi program dengan pihak lain

Mentee menyatakan beberapa inisiatif dalam menggalang kerjasama dengan anggota dewan yang lain, atau SKPD walaupun masih sebatas kerjasama dalam konteks komisi dimana *mentee* ditempatkan.

Dalam wawancara saat studi awal, *mentee* menyatakan belum ada LSM atau organisasi masyarakat yang bekerja sama dengan APP/APL mengadakan evaluasi atas implementasi suatu kebijakan. Saat ini, *mentee* telah bekerjasama dengan LPP Bone meningkatkan pengetahuan terutama dalam pemutakhiran data kemasyarakatan dan pengetahuan tentang hukum kebijakan.

April 2015	Januari 2016
<p>“Kerja sama dengan SKPD selama ini khusus di sektor komisi saya. Kalau dengan NGO kami belum punya inisiatif ke arah sana”.</p>	<p>“... LPP Bone banyak memberikan pengetahuan kepada saya mengenai keahlian tentang hukum kebijakan dan mendukung pemikiran tentang kolaborasi pendataan masyarakat miskin.”</p>

c. Andi Yusuf Akbar (Sekretaris Fraksi Golkar)

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Pada saat studi awal, pemahaman *mentee* mengenai fungsi-fungsi parlemen sudah lengkap namun tampak dalam wawancara bahwa di beberapa fungsi perlu pendalaman terutama dari sisi penyegaran basis legal-formal yang baru (*updating*).

Pada saat studi akhir ini, *mentee* mampu menunjukkan pemahamannya tentang fungsi-fungsi parlemen dengan menghubungkannya dengan basis legal formal saat ini yaitu UU No.17/2014 tentang MD3 dan UU No.23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam hal fungsi legislasi, saat studi awal *Mentee* mengakui bahwa untuk periode parlemen yang baru belum melahirkan inisiasi ranperda. Hal ini dilatarbelakangi adanya asumsi masih baru 5 bulan efektif bekerja sebagai APP/APL dan terlambatnya pembentukan alat kelengkapan sebagai konsekuensi perubahan UU MD3. Saat ini, *mentee* menyebutkan bahwa ada inisiatif DPRD yang tidak dalam prolegda atau disebut dengan perda akumulatif terbuka yakni perda yang dapat dibahas oleh DPRD meskipun tidak masuk dalam prolegda karena bersifat mendesak dan penting, tentu dengan konsekuensi tanpa ada anggaran dalam pembahasannya. Yang masuk dalam hal ini adalah perubahan atas perda, sebab hal yang berubah hanyalah pasal atau nomenklatur saja. *Mentee* juga mampu menjelaskan mengenai proses penyusunan perda mulai dari keberadaan naskah akademik hingga konsultasi publik.

Dalam hal fungsi pengawasan, *mentee* pada saat studi awal memaknainya dengan pengawasan secara administratif atas suatu program pembangunan di suatu daerah. Kunjungan reses bersama SKPD adalah meknisme utama menjalankan fungsi pengawasan. *Mentee* belum menjawab pertanyaan secara rinci bagaimana pelibatan kelompok masyarakat secara umum dalam mendukung fungsi pengawasan termasuk dalam konteks kegiatan-kegiatan non-reses. Masukan dari masyarakat masih mengandalkan mantan tim sukses yang bekerja sama di masa kampanye. Saat ini, *mentee* telah membuka jalur lebih lebar untuk interaksi dengan masyarakat. Keluhan masyarakat sering kali disampaikan pada saat reses atau kunjungan lapangan bersama komisi serta masyarakat mulai datang ke ruang aspirasi di gedung DPRD. Jika ada keluhan dari masyarakat maka kami akan melakukan kunjungan dan kemudian melakukan rapat kerja dengan SKPD melalui panitia kerja (Panja) dan hasilnya adalah rekomendasi kepada yang bersangkutan

Dalam hal upaya menyerap aspirasi masyarakat, dialog dengan konstituen sudah dilakukan tetapi masih dalam konteks kerja komisi, belum dilakukan secara tersendiri sebagai individu anggota parlemen.

April 2015	Januari 2016
<p>“Pengawasan itu kunjungan kerja ke kecamatan itu atas nama komisi...karena setiap kunjungan kerja ada kepala SKPD yang ikut. Saya juga langsung komunikasi dengan kepala desanya dan tentu saja tim-tim yang sebelumnya saya gunakan untuk pemilihan itu...ya bisa dikatakan sebagai pengawas liarlah...”</p>	<p>“Jadi kami dinilai tidak hanya dari kinerja (legislasi) saja, namun anggota dewan akan dikatakan sukses, kalau kamu sukses menjalin kerjasama dengan eksekutif dan tetap bergaul dengan konstituennya termasuk mengawasi pembangunan...”</p>

b) Relasi dengan Media

Mentee menyadari peran media tidak sebatas untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat tetapi sekaligus dapat menyampaikan keluhan kelompok masyarakat berkaitan kinerja pelayanan publik. Kegiatan dengan melibatkan jurnalis sementara ini diseleksi media dengan cakupan sebarannya terluas, tanpa menyebut strategi khusus bagaimana *mentee* melakukan pendekatan. Keunggulan *mentee* adalah memiliki latar belakang pendidikan komunikasi jurnalistik, sehingga relasi dengan jurnalis sudah terjalin. *Mentee* juga menyatakan telah menggunakan tipe media yang berbeda untuk menjangkau kelompok-kelompok konstituen yang beragam. *Mentee* telah menggunakan media sosial (terutama *facebook*) untuk menjangkau konstituen muda dan surat kabar (terutama *Tribun Bone*) untuk kelompok konstituen yang lebih senior. Perubahannya adalah saat ini *mentee* mulai mengintensifkan radio sebagai salah satu jalur diskusi publik.

April 2015	Januari 2016
<p>“Saya mengakses FB buat konstituen anak muda untuk orang tuanya surat kabar. Kalau di Bone itu yan masuk dalam distribusi 27 kecamatan ya baru <i>Tribun Bone</i>”.</p>	<p>“saya sejak awal sering melakukan diskusi informal dengan para wartawan. Selain FB yang masih aktif saya juga menggunakan media radio...”</p>

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Secara umum beberapa hal yang masih sama diungkapkan oleh *mentee* adalah:

- proram-program pemberdayaan perempuan seharusnya tidak hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja tetapi pada laki-laki juga. Dalam rangka mengawal program-program seperti ini pintu masuk pertama adalah prolegda.
- Untuk akses perempuan pada pekerjaan, *mentee* menyebutkan sudah berjalan beberapa program yang mendukung fokus tersebut sehingga ke tahap berikutnya adalah bagaimana mengawasi implementasinya.
- Dalam hal peningkatan kondisi tenaga kerja di luar negeri terutama perempuan, menurut *mentee* titik awal yang harus diperbaiki dan

hal ini kadang pemerintah lalai sehingga mempunyai dampak pada tingkat kesejahteraan bahkan keselamatan yaitu pelatihan sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Tidak hanya pemerintah daerah tetapi tentunya pemerintah pusat terutama dalam hal penguatan kerjasama bilateral.

- Untuk fokus pengurangan kekerasan terhadap perempuan, *mentee* sepakat adanya ide *crisis center*.

Hal yang ditekankan oleh *mentee* saat ini adalah mengenai pembaruan data dan desain programnya yaitu sejak merumuskan kegiatan, indicator keberhasilan sampai dengan analisis anggarannya.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> “... mengenai program pro-gender itu pada mulanya adalah hukum daerah. Jadi kalau diperbanyak perda yang pro-gender mau tidak mau APBD nya pasti akan teralokasi disitu”.</p>	<p><u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> “... yang menjadi masalah adalah adanya penyelenggara pendataan yang belum terintegrasi (BPS dan SKPD) selain adanya peraturan daerah yang pro poor penting tetapi yang tidak kalah urgent adalah adanya data valid sehingga kebijakannya akan tepat sasaran....”</p>
<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> “Ada program untuk pengusaha berpendapatan kecil dan ini memang fokusnya pada wanita. Di bagian pertanian juga ada salah satu slot programnya itu pelatihan petani wanita.”</p>	<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> “...perlu adanya penguatan organisasi khusus untuk penegakan hak-hak perempuan. Beberapa program SKPD sebenarnya sudah diarahkan ke sana, misalnya Dinas Perkebunan sudah memberikan pelatihan untuk wanita pengusaha tingkat desa.”</p>
<p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> “banyak TKW yang ijin kerjanya sudah dan kemudian kalau ketahuan akan dikejar-kejar polisi...jadi saya ini heran sebenarnya bagaimana penyuluhan awal mereka? Apa nggak ada training untuk bekerja di luar negeri? Tapi kan tidak sederhana itu, perlu juga langkah internasional. Pemerintah pusat harus memperkuat juga kerjasama bilateral terkait dengan perjanjian kerja.</p>	<p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> “...perlunya upaya mengoptimalkan sumber daya lokal untuk diolah sehingga secara tidak langsung akan mencegah mereka berangkat ke luar negeri.”</p>
<p><u>Pengurangan kekerasan dan perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u></p>	<p><u>Pengurangan kekerasan dan perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “...keberadaan peraturan yang</p>

April 2015	Januari 2016
“...untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan saya tidak bisa jawab daripada nanti mengarang-ngarang karena memang saya belum punya pengalaman ke sana”.	dapat mengurangi kekerasan perempuan dan anak adalah harus ada dulu...”

d) Integrasi program dengan pihak lain

Sejak awal *mentee* menyatakan pentingnya memaksimalkan hubungan kerja dengan SKPD terutama mitra untuk komisi tempat dimana *mentee* ditempatkan.

Perubahan Pola seperti ini juga berlaku ketika *mentee* akan berinteraksi dengan LSM dimana belum ada kegiatan nyata yang kemudian merefleksikan hubungan kemitraan.

April 2015	Januari 2016
“Untuk melengkapi pengetahuan kita (tentang suatu isu) selain dengan menggunakan teknologi, yang ke dua adalah perbanyak konsultasi dengan pihak eksekutif.” “...berhubungan dengan banyak pihak tentunya sudah, namun sejauh ini dari forum CSO, LSM dan sebagainya kalau secara resmi belum.”	“...saat ini bersama dengan LPP Bone terus mendampingi kasus pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya merasa kemitraan dengan LSM akan mampu mendapatkan umpan balik yang baik dan cepat.”

d. **Ir. Bahtiar Mala (Ketua fraksi PNBK)**

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Mentee telah mampu menyampaikan mengenai fungsi legislasi, prosesnya dari penyerahan naskah akademik, naskah raperda dan konsultasi publik. Dalam hal konsultasi public, menurutnya yang berhak melakukan adalah eksekutif karena pengusulnya dari eksekutif.

Dalam hal fungsi pengawasan, *mentee* menyatakan bahwa fungsi ini dijalankan untuk mengawasi pelaksanaan suatu peraturan daerah dalam kaitan pelayanan public. *Mentee* juga sudah berpengalaman dalam pertemuan verifikasi dengan SKPD, yaitu terkait soal pelayanan penyediaan air oleh PDAM. Pada saat studi awal, *mentee* menyatakan belum memiliki rencana khusus. Namun saat ini sudah menunjukkan perubahan terutama dalam hal upaya pelibatan masyarakat. *Mentee* menyatakan telah melakukan kunjungan kecamatan (tidak dalam rangka reses) setidaknya 3 kali dalam tahun ini dengan mengajak dan mengundang kelompok konstituennya.

Untuk fungsi penganggaran, *mentee* menyatakan bahwa di Kabupaten Bone sangat tidak sinkron antara apa yang dijabarkan melalui rencana kerja menengah pemerintah dengan anggaran yang berlaku saat ini. Hal ini dapat terjadi karena anggaran adalah produk politik sehingga pengesahannya adalah berdasar suara mayoritas dimana kadang tidak mempertimbangkan rencana kerja pembangunan.

Dalam hal upaya menyerap aspirasi masyarakat, *mentee* menyadari bahwa perlu untuk sering menadakan kunjungan lapangan ke konstituen untuk menyerap aspirasi. Dialog dengan konstituen sudah dilakukan baik dalam konteks reses maupun non-reses, tetapi masih belum terlihat bagaimana masukan dari kunjungan ke kelompok-kelompok konstituen secara programatik ditindak lanjuti terutama untuk sektor-sektor di luar komisi yang bersangkutan.

April 2015	Januari 2016
“... di Kabupaten Bone ini sangat tidak sinkron antara rencana kerja menengah dengan anggaran. Terus terang saja hal begini ini di DPR kan persoalan mayoritas. Walaupun saya tidak setuju, tetapi mayoritas menginginkan yang lain...ya keputusan yg di mayoritas.”	“...nggak harus nunggu reses, setiap hari saya tinggal di dapil dan setiap jum’at keliling jum’atan menyampaikan kepada masyarakat tentang program-program saya...”

b) Relasi dengan Media

Mentee menyadari peran media memang penting baik untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat maupun sebaliknya juga dapat berfungsi sebagai kontrol yaitu melalui pemberitaan tentang keluhan kelompok masyarakat. Dalam prakteknya *mentee* belum memiliki pendekatan khusus.

Pada saat studi awal, penjelasan yang muncul masih dalam tataran pengetahuan normatif dan sikap yang memang menunjukkan bahwa *mentee* sangat sadar ketika berhubungan dengan media dapat bermakna dua hal seperti penjelasan di atas, namun *mentee* tidak menjelaskan bagaimana pemahaman tersebut dituangkan dalam kegiatan-kegiatan bersama media.

Saat ini, *mentee* menyatakan mulai lebih banyak mendatangi jurnalis dan mengajak diskusi secara informal, menurutnya untuk mendapatkan informasi dan umpan balik. Media yang biasa diajak diskusi adalah radar bone.

April 2015	Januari 2016
“Saya pikir terbangun sejak awal. Namanya DPR dengan media itu kan partner, memang terbangun sejak awal.....jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dengan media kita harus	“sangat penting, saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman media untuk tahu informasi apa yang sedang berkembang, jadi memang bukan sebatas konferensi

<i>memastikan bahwa mereka bekerja secara profesional”.</i>	<i>pers menyampaikan berita tapi untuk mendapatkan masukan juga dari media.”</i>
---	--

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Pada saat studi awal, *mentee* masih memandang bahwa pemberdayaan perempuan bukan sebuah fokus yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, fokus yang menembus batas komisi dan lembaga, *mentee* masih berpikir bahwa fokus ini adalah tanggung jawab lembaga tertentu. Perubahan pandangan yang tampak pada saat studi akhir ini adalah *mentee* menyampaikan bahwa para perempuan miskin ini perlu menjadi subjek dalam pendataan sehingga memastikan mereka masuk dalam data. Mengundang perempuan miskin dalam musyawarah desa adalah hal yang dapat dilakukan.

April 2015	Januari 2016
<i>“Untuk isu-isu itu (5 tema utama MAMPU) saya tidak terlalu tahu, apalagi persoalan-persoalan itu tidak terkait dengan komisi saya. Namun saya lihat lembaga pemberdayaan (LSM) telah melakukan kerja nyata dalam mendampingi wanita, ya adanya lembaga-lembaga yang dinaungi LPP itu”.</i>	<i>“...saya rasa mereka harus dilibatkan dengan cara diajak datang di musyawarah desa... ..apalagi sekarang semua SKPD melakukan pendataan kemiskinan, jadi harus diajak itu...”</i>

Untuk tema utama membuka akses perempuan dalam pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi, *mentee* menyatakan bahwa pendidikan pelatihan keterampilan bagi perempuan terutama yang tidak mampu harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja termasuk melibatkan praktisi dalam pengayaan materi. Dalam kaitan tenaga kerja perempuan ke luar negeri, *mentee* mengemukakan perlu adanya pengetatan izin. Izin dan paspor hanya dapat dikeluarkan bagi yang benar-benar sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan bersertifikat dari BLK.

Untuk tema utama kesehatan reproduksi, *mentee* menyatakan perlu adanya peningkatan anggaran kesehatan dimana pembahasannya harus melibatkan puskesmas untuk kemudian menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Namun *mentee* belum mampu menyebutkan secara rinci dalam hal apa peningkatan anggaran kesehatan yang dimaksud.

d) Integrasi program dengan pihak lain

Mentee masih belum mampu menjelaskan bagaimana tindak lanjut ketika isu/topik yang muncul dalam kunjungan ke konstituen ternyata di luar sektor komisi tempat dia ditempatkan.

Interaksi dengan SKPD sebagai mitra kerja lebih pada ruang lingkup komisi yang bersangkutan. Tidak muncul penjelasan, misalnya bagaimana *mentee* membantu penyelesaian isu di luar sektor komisi yang bersangkutan dengan menghubungkan kelompok konstituen misalnya dengan SKPD yang bertanggung jawab terhadap isu tersebut sekalipun SKPD tersebut bukan mitra kerja utama.

Dalam wawancara, *mentee* menyatakan sejak awal sudah sangat dekat dengan kelompok konstituen di dapilnya dan sudah terbangun komunikasi sejak awal dengan kalangan LSM terutama LPP Bone untuk analisis anggaran.

April 2015	Januari 2016
<p>“Saya pikir untuk menjangkau hal-hal di lapangan, selain dengan media, kelompok-kelompok tertentu itulah tugasnya untuk membantu juga menyampaikan informasi. Sejak kerja dari awal, sudah terbangun komunikasi dengan LPP.”</p>	<p>“...LPP ini selalu kupas tuntas tentang penganggaran dan sangat membantu kami mengawasi dalam proses satu tahun ini sebagai DPRD...”</p>

e. H. Kaharudin (Wakil Komisi 2 DPRD, F Demokrat)

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Sebagai petahana, dengan mengacu pada pengalaman periode sebelumnya, sejak awal *mentee* mampu memberikan penjelasan walaupun masih secara umum tentang proses penyusunan peraturan daerah. Pada saat studi akhir ini, *mentee* sudah mampu menjabarkan mengenai proses penyusunan peraturan daerah dari proses penyusunan naskah akademis oleh eksekutif hingga pembahasan oleh badan legislasi untuk mengetahui apakah sudah layak atau belum pembahasan bersama pansus dan konsultasi public. Namun demikian, *mentee* memandang bahwa konsultasi publik seharusnya dilakukan oleh eksekutif sebagai pengusul.

Dalam konteks fungsi pengawasan, pernyataan *mentee* secara substansi tidak mengalami perubahan. *Mentee* telah terbiasa menjalankan fungsinya dalam konteks wakil daerah tidak dalam sekat-sekat komisi. *Mentee* juga menyebutkan telah banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat agar menerima lebih banyak informasi.

Untuk fungsi penganggaran, *mentee* dapat menjelaskan aturan dasar peraturan perundangan yang harus menjadi referensi. Dalam konteks ini, perhatian *mentee* lebih pada dialog politik yang kadang mengganggu proses sinkronisasi anggaran dengan perencanaan dimana telah melalui penjaringan aspirasi dari masyarakat.

April 2015	Januari 2016
“...tantangan di penganggaran adalah memilih korelasinya dengan perencanaan-perencanaan yang ada, sementara saya saat ini tidak terlalu masuk disitu karena saya di komisi 3 walaupun kami juga sudah memberi masukan ke Banggar”.	“...melakukan analisis terutama KUA/PPAS untuk merasionalisasikan yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah. Selain itu, juga melakukan analisis perspektif gender.”

b) Relasi dengan Media

Mentee menyadari pentingnya peran media tidak sebatas untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat tetapi sekaligus dapat menyampaikan keluhan kelompok masyarakat berkaitan kinerja pelayanan publik. Kegiatan dengan melibatkan jurnalis sementara ini diseleksi media dengan cakupan sebarannya terluas, *Mentee* juga menyatakan telah menggunakan tipe media yang berbeda untuk menjaring kelompok-kelompok konstituen yang beragam.

Pada saat studi awal dilakukan, sesuatu yang mengemuka untuk ditingkatkan adalah dialog dengan jurnalis atau media massa (termasuk media sosial) secara rutin dengan tema programatik tertentu sehingga hasilnya akan lebih terukur. Saat studi akhir dijalankan, *mentee* menyatakan telah beberapa kali mengajak dan menghubungi media jika akan melakukan kunjungan ke lapangan.

April 2015	Januari 2016
“...semua saya pakai, media audiovisual lewat TV sering saya lakukan, media cetak melalui koran maupun majalah sudah saya lakukan, media audio elektronik seperti radio juga. Malah dalam mengaktualisasi diri saya juga kadang-kadang saya pakai sms broadcast”.	“...selain media cetak dan radio saya juga menggunakan BBM... saya sering membuat status di BBM jika akan kunjungan dan kadang saya kirim ke teman-teman media juga...”

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Secara substansial *mentee* menunjukkan perubahan kedalaman analisis. Pada awal program, *mentee* menyatakan bahwa proram-program pemberdayaan perempuan seharusnya tidak hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja tetapi pada laki-laki juga, memang secara pribadi juga dikatakan bahwa kalau secara spesifik belum pernah ada yang dilakukan. Dalam studi akhir ini, *mentee* menyatakan perlunya integrasi antar sektor. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan setidaknya harus ada pemberdayaan ekonomi dan kesehatan baik di tingkatan pribadi maupun lingkungan. *Mentee* juga menyodorkan contoh integrasi pemberdayaan perempuan di Bone dimana menjadi bagian dari Program Kabupaten Bone Sehat.

Dalam hal peningkatan kondisi tenaga kerja di luar negeri terutama perempuan, pandangan *mentee* belum berubah. *Mentee* menyatakan bahwa peran anggota dewan di ranah peraturan bukan implementasi maka langkah awal yang harus diperbaiki adalah sinkronisasi peraturan mulai dari pelatihan, perijinan sampai penempatan baik dari daerah sampai dengan pusat.

April 2015	Januari 2016
<p>“...yang mau kita lakukan adalah bagaimana kita membuat regulasi tentang ketenagakerjaan agar lebih konkrit, jangan menjadi buruh di tempat orang usaha menjadi tenaga profesional. Salah satunya kita sudah membuka BLK. Tantangannya adalah seringkali terbentur seringnya berubah namanya regulasi dari pusat, sehingga kita harus mengikuti di daerah, ini termasuk juga perubahan kewenangan kami”.</p>	<p>“...upaya pelatihan yang diberikan oleh dinas tenaga kerja selama ini sudah cukup dan pengetahuan masyarakat juga sudah cukup. Pemerintah dan DPRD hanya perlu turun tangan jika mereka ada masalah saja.”</p>

d) Integrasi program dengan pihak lain

Mentee sejak awal menyatakan pentingnya memaksimalkan hubungan kerja dengan SKPD terutama mitra utama komisi dimana *mentee* ditempatkan. Peningkatan pola komunikasi ini juga berlaku ketika *mentee* akan berinteraksi dengan LSM dimana belum ada kegiatan nyata yang kemudian merefleksikan hubungan kemitraan.

Dalam tataran praktek, tidak muncul penjelasan konkrit bagaimana strategi *mentee* dalam rangka meningkatkan kerjasama tersebut baik dengan SKPD maupun LSM. *Mentee* lebih fokus pada mitra-mitra yang sudah ada dalam jaringan, belum muncul bagaimana membuka jaringan baru sebagai salah satu opsi strategi meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.

April 2015	Januari 2016
<p>“untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, saya kira intensif komunikasi secara masif sehingga tidak ada yang terlewat. Sebagai contoh hasilnya adalah kemarin apa yang kita sampaikan oleh LPP melalui beberapa program yang kerjasama dengan LPP Bone ini kita sudah memberikan kepada pemerintah meskipun belum 100% diserap, tapi insyaAllah selesai dengan berjalannya waktu”.</p>	<p>“...ya... SKPD selama ini memang yang jadi mitra kami intensif dalam melakukan komunikasi. Kalau LSM lebih banyak dengan LPP ya... kami banyak berdiskusi, mereka suka kasih masukan...”</p> <p>“kelompok konstituen itu pasti kami lakukan komunikasi intens... mereka banyak menyampaikan juga tentang kebutuhan-kebutuhan”.</p>

f. **Andi Samsidar Ishak (Wakil Ketua DPRD, Gerindra), Hj. Mintayu Samsudin (Fraksi Golkar), dan Suharni (Fraksi Nasdem)**

Perubahan mendasar dari ketiga APP/APL ini adalah keberanian menyatakan pendapat masing-masing secara terpisah dimana pada saat studi awal tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat sehingga wawancara pada saat itu dilaksanakan secara kelompok (*group interview*)

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Andi Samsidar Ishak

Dalam fungsi legislasi, *mentee* menjelaskan bahwa fungsi ini adalah membahas peraturan daerah yang diajukan oleh eksekutif. Pembahasan dilakukan oleh pansus dan lewat konsultasi public dimana dilakukan oleh DPRD maupun eksekutif. Ketika ditanyakan apakah DPRD juga dapat mengusulkan perda? *Mentee* menjawab dapat mengusulkan namun sampai saat ini belum melakukannya.

Untuk fungsi pengawasan, dalam pandangan *mentee*, pengawasan dilakukan oleh DPRD untuk anggaran yang sudah disepakati bersama dengan eksekutif (SKPD) agar tepat sasaran dan tidak menyalahi peraturan. DPRD dapat memanggil SKPD untuk menanyakan jika ada keluhan dari masyarakat. Dalam mendukung fungsi ini *mentee* telah mencoba melibatkan konstituennya untuk mendapatkan masukan mengenai pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam fungsi penganggaran, *mentee* menyampaikan bahwa eksekutif mengatur anggaran dan legislatif mengawasi penggunaannya. *Mentee* dan APP/APL lainnya telah melakukan analisis anggaran. Namun demikian, *mentee* juga menyatakan membutuhkan pelatihan lebih mendalam bagaimana menghitung dan membahas anggaran agar “tidak kecolongan” dalam memahami anggaran daerah usulan eksekutif.

Hj. Mintayu Samsudin

Mentee menjelaskan fungsi legislasi masih secara umum yaitu menyebutkan bahwa fungsi ini berkaitan dengan membuat dan menetapkan perda. *Mentee* juga menyebutkan bahwa sampai periode ini belum ada perda inisiatif DPRD, masih melakukan pembahasan perda yang diajukan oleh eksekutif.

Dalam pengawasan, *mentee* menjelaskan bahwa fungsi DPRD adalah melakukan evaluasi terhadap SKPD termasuk di dalamnya adalah berdasarkan aspirasi yang masuk dari masyarakat. jika ada keluhan dari masyarakat, *mentee* langsung melakukan kros-cek lapangan dan memanggil SKPD yang menjadi mitra komisinya, jika bukan mitra komisinya maka disampaikan kepada teman dari komisi yang bersangkutan.

Dalam penganggaran, mentee banyak dibantu oleh LPP Bone melakukan analisis anggaran. Biasanya masih analisis sederhana tentang belanja dan pendapatan.

Suharni

Dalam pandangan mentee, fungsi legislasi adalah fungsi membuat Perda. Namun mentee tidak mau menjelaskan proses secara rinci. Dalam kebiasaan selama ini yang dia lakukan adalah ketika membahas Perda hanya mengikuti proses sidang paripurna. Sedangkan dalam untuk fungsi pengawasan dan penganggaran, mentee masih belum memahami.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Dalam kaitan fungsi legislasi:</u> <i>"...pembuatan perda itu bukan serta merta anggota dewan, ini sebenarnya datangnya dari eksekutif, pemerintah...kita sebagai anggota dewan itu kan cuma menyetujui dengan sebelumnya menyelidiki apakah bermanfaat buat masyarakat atau tidak"</i></p> <p><u>Dalam kaitan fungsi pengawasan:</u> <i>"...kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk terjun langsung termasuk wartawan ikut mengawasi program-program yang dilakukan SKPD, mengawasi anggaran yang dipakai itu sesuai ndak"</i></p> <p><u>Dalam kaitan fungsi penganggaran:</u> <i>"Karena kita ini baru maka apa yang sudah kita lakukan karena baru melalui"</i></p>	<p><u>Dalam kaitan fungsi legislasi:</u> Andi Samsidar Ishak: <i>"...fungsi kami sebagai legislatif adalah membuat peraturan karena ini kebutuhan masyarakat."</i></p> <p>Hj. Mintayu Samsudin: <i>"...itu adalah berkaitan dengan membuat perda tapi ya...sampai sekarang belum ada usulan yang dari dewan".</i></p> <p>Suharni: <i>"...legislasi artinya kita tugasnya membuat perda".</i></p> <p><u>Dalam kaitan fungsi pengawasan:</u> Andi Samsidar Ishak: <i>"...kami mengawasi pembangunan agar berpihak kepada masyarakat. Dalam hubungan ini dibutuhkan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat..."</i></p> <p>Hj. Mintayu Samsudin: <i>"Fungsi pengawasan artinya adalah evaluasi kerja berdasar masukan dari masyarakat".</i></p> <p>Suharni: <i>"Fungsi pengawasan adalah mengawasi SKPD melakukan pembangunan..."</i></p> <p><u>Dalam kaitan fungsi penganggaran:</u> Andi Samsidar Ishak: <i>"...ya... kami hitung dan kadang tidak sesuai dengan input, lebih banyak SPD mereka..."</i></p>

April 2015	Januari 2016
<i>satu kali fase penggaran ya...baru pembahasan dengan SKPD per komisi itu...</i>	<p>Hj. Mintayu Samsudin: <i>"...kami menghitung belanja langsung dan belanja tidak langsung, di tahun 2016 saja belanja tidak langsungnya 1,4 belanja langsungnya 600 M..."</i></p> <p>Suharni: <i>"...kalau fungsi anggaran adalah mengawasi anggaran yang sudah ditetapkan pada masing-masing SKPD".</i></p>

b) Relasi dengan Media

Andi Samsidar Ishak

Mentee menganggap cukup penting berinteraksi dengan media massa, untuk menyampaikan informasi kegiatan DPRD. Dan selama ini selalu menghubungi media untuk terlibat dalam kunjungan ke lapangan, terutama kunjungan komisi.

Dalam beberapa temuannya juga disampaikan ke media massa, namun tidak pernah menjadi berita karena menurutnya media sudah tidak berimbang dalam memberitakan. lebih memihak pemerintah daerah.

Hj. Mintayu Samsudin

Mentee menganggap bahwa DPRD tanpa media massa maka tidak ada artinya, untuk itulah mentee selal melibatkan jurnalis dalam setiap kegiatannya baik melalui SMS maupun BBM dan media social.

Suharni

Mentee memandang hubungan dengan media sangat penting, sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat. mentee menyebut bahwa untuk menjalin omunikasi dengan media dia melakan dengan diskusi langsung secara informal dengan para jurnalis serta selalu menghubungi jika ada kegiatan, meskipun tidak semua kegiatan dia mengajak media terutama media cetak.

April 2015	Januari 2016
<i>"Kalau saya memang dalam setiap bulan harus ada rutin pertemuan dengan para media bukan cuma konferensi pers. Saya kadang mengundang beliau para media itu menanyakan sebenarnya ada apa</i>	<p>Andi Samsidar Ishak: <i>"...kalo media sudah disumbat, tidak akan pernah ada beritanya lagi..."</i></p> <p>Hj. Mintayu Samsudin: <i>"saya selalu bikin status di BBM dan</i></p>

April 2015	Januari 2016
<p><i>sekarang di wilayah ini.... saya membuthkan masukan-masukan dari mereka”.</i></p>	<p><i>media social dan menghubungi mereka juga jika ke lapangan... ya... terutama kunjungan komisi ke lokasi kerja... ya...kadang ada yang datang tapi kadang tidak...”</i></p> <p>Suharni: <i>“sangat penting sekali, karna media adalah dapat memberikan info yang jelas kepada masyarakat kalo yang kami lakukan berpihak kepada masyarakat kecil.”</i></p>

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Andi Samsidar Ishak

Dalam pandangan mentee untuk akses perempuan dalam perlindungan social, bahwa masyarakat harus diberdayakan dan dilibatkan juga dalam pendataan terutama bersama dengan pemerintah desa. Dan mentee saat ini juga terlibat aktif bersama komunitas Ponceng Pintar yang memberdayakan kaum perempuan di daerah miskin dan kumuh di tepi kecamatan Watampone.

Dalam pandangan mengenai tenaga kerja perempuan ke luar negeri, mentee menjawab bahwa perlu adanya peraturan yang mengharuskan calon tenaga kerja melaporkan ke desa dan pemerintah daerah (disnaker) dan sinergi desa dengan disnaker. Juga pemerintah harus memberikan pelatihan untuk mengolah sumber daya lokal.

Sementara itu untuk kesehatan reproduksi perempuan dan mencegah kekerasan pada perempuan, dalam pandangan mentee, sosialisasi dan pendidikan harus dilakukan semua pihak. Pada saat ditanyakan alokasi anggaran, mentee belum mau menjawab mengenai hal ini.

Hj. Mintayu Samsudin

Menurut *mentee*, agar akses perempuan miskin dapat menjangkau program perlindungan sosial, maka pendataan harus dilakukan dengan baik dan melibatkan pemerintah desa serta tokoh masyarakat.

Untuk kesehatan reproduksi perempuan, *mentee* menyatakan tidak perlu menambah anggaran namun mengoptimalkan SKPD dan Puskesmas mulai masuk ke sekolah.

Suharni

Dalam pandangan *mentee*, untuk meningkatkan akses perempuan tenaga kerja di luar negeri harus dengan regulasi yang berkaitan dengan

perlindungan perempuan. Namun dalam pernyataannya, *mentee* belum berupaya mendorong hal ini secara kelembagaan DPRD. Selama ini masih sebatas melakukan sosialisasi saja di konstituen tentang apa-apa yang harus dilakukan jika akan keluar negeri.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan, peningkatan alokasi anggaran harus dilakukan terutama untuk sarana kesehatan.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“saya pernah mengatasi masalah ibu rumah tangga yang mengalami KDRT. Karena kita selaku anggota dewan, saya sudah arahkan sama LPP untuk mengatasi hal macam ini. Untuk TKW saya belum, masih masaah KDRT”</i></p> <p><i>“karena isu seperti ini (5 tema utama MAMPU) masuknya itu kan masalah kesejahteraan masyarakat, semntara kami di komisi 2 maka kami harus memberi masukan kepada komisi 4”</i></p> <p><i>“Perda yang saya ingin punya inisiatif adalah tentang keluarga sakinah...dimana ada kebijakan untuk perempuan dan laki-laki agar supaya menikah tidak hanya mengikuti emosional tetapi juga kemudian harus melalui konsultasi”</i></p>	<p>Andi Samsidar Ishak: <i>“...kita harus mampu mengolah sumber daya local, mumpun enceng gondong masih banyak, dinas kasih pelatihan dan kita olah... yaa... jadi nggak harus pergi ke luar negeri. Untuk masalah reproduksi, saya sudah melakukan lewat ponceng pintar... LPP selalu hadir untuk memberikan pendidikan juga ke masyarakat ponceng ini...”</i></p> <p>Hj. Mintayu Samsudin: <i>“inikan masalahnya dalam data... semua SKPD sudah diberikan tugas dan menganggarkan untuk melakukan pendataan di semua kecamatan. Sementara untuk kesehatan reproduksi, “...menambah anggaran tidak perlulah, saya rasa pemerintah sudah terlalu bagus dengan memberikan anggaran semua ke masyarakat...”</i></p> <p>Suharni: <i>“...yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi buat konstituen hal hal menyangkut apa saja yang harus dilakukan jika mau ke luar negeri mencari kerja.”</i></p>

d) Integrasi program dengan pihak lain

Andi Samsidar Ishak

Relasi dengan konstituen, dilakukan dengan menghadiri Musrenbang dan reses. Juga mulai terlibat aktif dalam kelompok ibu-ibu yang kreatif, sehingga *mentee* cukup banyak mengetahui perkembangan di lapangan. Kelompok ibu-ibu kreatif yang dimaksud adalah Kelompok Ponceng Pintar yang memberikan pendidikan gratis bagi warga di kelurahan Ponceng.

Hj. Mintayu Samsudin

Mentee menyatakan belum akan bekerjasama dengan LSM, sebab ada trauma dan harus hati-hati jika bekerjasama dengan LSM. Persepsi mengenai LSM adalah mereka yang selalu mencari-cari kesalahan saja dan ada trauma *mentee* terhadap LSM.

Suharni

Upaya yang dilakukan oleh *mentee* dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain adalah dengan memperbanyak pertemuan dengan banyak pihak, terutama komunitas di Bone, seperti komunitas ibu-ibu di desa dan kelompok konstituen.

Namun dalam pandangan *mentee*, hubungan dengan SKPD masih terbatas dengan mitra kerja komisi, untuk SKPD lain masih perlu dilakukan secara lebih optimal. Demikian halnya dengan LSM. *Mentee* hanya intensif bekerja sama dengan LPP Bone dan masih sebatas sebagai peserta kegiatan program.

April 2015	Januari 2016
<i>“Tentu SKPD kita harus tetap berhubungan. Kemarin terakhir-terakhir ini kita sempat mengevaluasi pekerjaan para SKPD itu kita bahas bersama-sama per komisi”.</i>	Andi Samsidar Ishak: <i>“...dalam musrenbang saya sampaikan kepada kepala desa, tolong usulan masyarakat dimasukkan dalam musrenbang...dan ini ada skala prioritas, yang pertama adalah harus ada pemberdayaan perempuannya...”</i> <u>Hj. Mintayu Samsudin:</u> <i>“banyak LSM yang mengorek-orek dan ceritanya hanya mau mencari kesalahan kita... itu yang saya perlu hati-hati.... Dan akan melaporkan kita ke polisi”</i> <u>Suharni</u> <i>“...sementara ini saya bekerja sama dengan SKPD ya...sebatas tugas saja. ...hubungan dengan LSM, ya...sama LPP”.</i>

g. Drs Andi Taufiq Kadir (Wakil Ketua DPRD, Nasdem)

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Dalam menjelaskan fungsi-fungsi DPRD, *mentee* tidak mengalami perubahan sebagaimana pada saat baseline. Mampu memberikan definisi namun tidak dapat menjelaskan secara rinci kegiatan dan

tahapannya dalam penyusunan perda dan pembuatan prolegda. Ketika ditanyakan jumlah Perda yang dibahas juga tidak mengetahui secara pasti.

Dalam fungsi pengawasan, bukan memeriksa namun pengawasan kebijakan saja. Kontrolnya hanya cukup memanggil SKPD untuk dimintai keterangan. Dalam pengawasan *mentee* melibatkan masyarakat konstituen untuk mendapatkan masukan. Selain itu dalam mengawasi anggaran juga melakukan analisis pembiayaan. Latar belakang *mentee* adalah mantan birokrat di Bone

April 2015	Januari 2016
<p><i>“Perumusan perda itu adalah hasil prolegda dulu, setelah itu baru perda dimana ada dua macam yaitu hak inisiatif DPR sendiri dan satunya badan eksekutif”</i></p> <p><i>“...inilah yang dilakukan oleh partai saya, yai memerintahkan untuk membuat posko aspirasi per kecamatan. Jadi kita membuat suatu rumah untuk aspirasi dengan nama kita termasuk HP. Tapi sampai hari ini belum jalan dengan baik.... masyarakat disini sepertinya takut untuk melapor”</i></p>	<p><i>“...DPRD ini kan cuman tiga fungsi doang... dalam legislasi, saya kan baru terpilih jadi ada eksekutif yang mengusulkan dan saya belum tahu karena baru terpilih...dan sepertinya belum ada yang didorong DPRD...”</i></p> <p><i>“...kalau mau jujur, itu belanja perjalanan dinas, makan minum, ATK tinggi sekali... tapi kita ini partai kecil jadi, ya....”</i></p>

b) Relasi dengan Media

Dalam hubungan dengan media, sejak awal *mentee* sudah memandang penting, sebab media akan menyampaikan informasi dari dan kepada masyarakat. Akan tetapi, *mentee* juga menyebutkan bahwa dalam relasi dengan media selama ini hanya sebatas diminta memberikan komentar atas suatu isu. Untuk inisiatif pemberitaan lebih banyak dilakukan oleh Pimpinan Dewan.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“Media itu sangat penting, apa pun yang kita lakukan apabila tidak disuarakan oleh media maka masyarakat tidak akan tahu. Media itu kan mitra kami dan kalau takut terhadap wartawan pasti tidak bisa maju, apalagi kalau takut dikritik”.</i></p>	<p><i>“...media baik cetak dan elektronik ini menyampaikan informasi ke masyarakat... kan kadang orang takut dikritik oleh media, jadi... media yang kritis ini penting... radio bif ... kalau RRI kan berbeda...”</i></p>

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Pada saat studi awal, *mentee* memandang bahwa pemberdayaan perempuan bukan sebuah fokus yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, fokus yang menembus batas komisi dan lembaga, *mentee* masih berpikir bahwa fokus ini adalah tanggung jawab lembaga tertentu.

Dewan akan dibutuhkan hanya ketika muncul suatu masalah dalam pelaksanaannya. Saat ini pandangan ini sudah berubah. *Mentee* menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan butuh perjuangan dan semua pihak harus terlibat. Namun bentuk kegiatan seperti apa, *mentee* tidak menjawab.

Mentee juga menyatakan peran dewan lebih pada pengawasan yaitu dengan tetap memperbarui data atau informasi mengenai apa yang telah terjadi di lapangan. Dengan kata lain, pemahaman pemberdayaan perempuan yang masih mengambang, maka ketika ada pertanyaan apa saja yang telah atau akan dilakukan, *mentee* belum memberikan jawaban secara konkrit.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> <i>"...untuk masing-masing tema itu kita sudah salurkan ke komisi masing-masing. Kemudian akan masuk di SKPD terkait, misalnya kalau ada yang complain baru kita masuk ke situ...urusan TKW, deskriminasi ya, seperti itu"</i></p>	<p><u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> <i>"...butuh perjuangan...dan semua pihak... yaaa...kalau kegiatannya apa SKPD yang tahu dik..."</i></p>
<p><u>Membuka akses perempuan kepada program perlindungan sosial</u> <i>"itu kan eksekutif yang punya...misalnya kalau ada yang complain baru kita masuk...itu kan dari kesehatan jangan kita mengklaim pekerjaan orang"</i></p>	<p><u>Membuka akses perempuan kepada program perlindungan sosial</u> <i>"...teknisnya yang akan melakukan adalah pemda, yang bisa dilakukan dewan adalah membuat kebijakan"</i></p>
<p><u>Perbaiki kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>"...sering ada pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, karena di bagian saya tidak pernah, saya tidak mau berbicarangelantur.... apa yang saya bicarakan ya...apa yang saya alami "</i></p>	<p><u>Perbaiki kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>"...kalau urusan perempuan tanya perempuan... masak laki-laki yang bicara... "</i></p>

d) Integrasi program dengan pihak lain

Dalam konteks kerjasama dengan pihak lain, sejak awal *mentee* memandang penting untuk menjembatani hubungan dengan eksekutif. Bentuk kerja sama yang dilakukan harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam pandangan *mentee*, kerjasama dengan SKPD terutama dalam implementasi pembangunan adalah hal penting. Sebab yang memiliki anggaran dan kewenangan melaksanakan adalah SKPD. Selain itu, jumlah anggota dewan dari satu fraksi adalah 4 orang dari 45 anggota DPRD sehingga berkomunikasi dengan anggota dewan dari fraksi lain adalah hal penting.

April 2015	Januari 2016
“Jadi kalau saya, bagaimana berkomunikasi dengan partai lain karena partai saya ini cuma 4 orang dari total 45”.	“Sangat penting untuk bekerja sama dengan pemda karena kuasa pengguna anggaran ada di SKPD dan juga tentunya dengan partai lain di dewan”.

h. Andi Muh Saiful (Fraksi PPP)

(Sampai dengan selesainya penulisan laporan studi akhir ini, peneliti belum dapat melakukan wawancara dengan *mentee* dengan alasan sakit.)

i. Syamsul Bahri (Anggota Golkar).

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Masih sama dengan saat studi awal dilakukan, dalam fungsi legislasi, *mentee* belum mampu memberikan penjelasan secara jelas proses penyusunan suatu peraturan daerah. Penjelasan masih sangat umum tidak muncul penjelasan misalnya bagaimana penyusunan naskah akademik atau mekanisme konsultasi publik untuk mendiskusikan suatu ranperda. Sesuatu hal lain yang perlu diuji erifikasinya adalah pernyataan kinerja fungsi legislasi selama ini yang berbeda dengan penjelasan *mentee* yang lain.

Dalam hal fungsi pengawasan, *mentee* menyatakan bahwa fungsi ini dijalankan untuk mengawasi pelaksanaan suatu peraturan daerah terutama dalam kaitan implementasi APBD. *Mentee* menyatakan selama ini dalam menjalankan fungsi ini belum melibatkan kelompok masyarakat. Perubahan yang muncul adalah saat ini *mentee* lebih banyak mendatangi konstituennya untuk mendapatkan informasi dan membahasnya dalam sidang komisi. Jika temuan atau keluhannya tidak sesuai dengan komisinya maka di sampaikan ke komisi yang bersangkutan.

April 2015	Januari 2016
“.... Kalau untuk legislasi...selama 5 bulan ini saya selaku anggota DPR yang baru...sudah mampu membuat aturan regulasi yaitusebanyak 8 perda termasuk APBD .”	“...dalam hal pengawasan, setelah selesai kunjungan lapangan kami bahas di komisi... yaa... biasanya kunjungan itu kami lakukan juga saat reses...”

b) Relasi dengan Media

Mentee belum menunjukkan perubahan walaupun sejak awal sudah menyadari peran media memang penting baik untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat maupun sebaliknya juga dapat berfungsi sebagai kontrol yaitu melalui pemberitaan tentang keluhan kelompok masyarakat.

Mentee selama ini masih belum melakukan hubungan dengan media, dalam hal pernyataan sikap lebih banyak dilakukan oleh ketua komisi dan pimpinan dewan.

April 2015	Januari 2016
<i>“Media seharusnya tidak hanya pintar mengkritisi pemerintah tetapi media juga bisa memberikan solusi atas sebuah permasalahan”.</i>	<i>“saya melihat media seharusnya ngasih solusi juga dalam pemberitaannya...maka berimbang itu perlu. Komunikasi dengan mereka sesuai tatib kan ketua dan pimpinan yang konferensi pers...”</i>

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Masih sama dengan studi awal, tidak banyak perubahan yang muncul. Pernyataan *mentee* kurang konkrit, hanya menyampaikan jawaban-jawaban normatif. Tingkat pengetahuan serta sikap positif atas tema utama MAMPU tidak berkembang menjadi langkah konkrit.

Namun demikian pada tema kesehatan reproduksi, *mentee* mengemukakan hal konkrit dengan menyebutkan bahwa seharusnya sosialisasi dilakukan intensif oleh kader kesehatan dan puskesmas. Upaya penambahan anggaran memungkinkan untuk diperjuangkan.

April 2015	Januari 2016
<u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“Seharusnya yang kita lakukan adalah pendampingan-pendampingan terhadap perempuan-perempuan yang mengalami deskriminasi ini.”</i>	<u>Perbaikan kesehatan reproduksi perempuan</u> <i>“...saya rasa kader kesehatan harus ada di setiap desa baik posyandu maupun dan puskesmas harus aktif. Kalau penambahan anggaran jika memungkinkan saya rasa perlu juga...”</i>

April 2015	Januari 2016
<p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> “...TKW yang akan diberangkatkan ke luar negeri ini seharusnya diberikan terlebih dahulu pelatihan-pelatihan BLK dan kemudian di data lokasi yang akan dituju.”</p> <p><u>Pengurangan kekerasan dan perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “...seharusnya selaku anggota DPR kalau untuk menghadapi isu seperti ini membuka rumah aspirasi supaya ada tempat yang bisa didatangi oleh masyarakat”.</p>	

d) Integrasi program dengan pihak lain

Sama halnya saat studi awal dilakukan, interaksi dengan SKPD sebagai mitra kerja lebih pada ruang lingkup komisi yang bersangkutan. Tidak muncul penjelasan, misalnya bagaimana *mentee* membantu penyelesaian isu di luar sektor komisi yang bersangkutan.

Dalam wawancara, pernyataan *mentee* mengenai kerja sama dengan LSM masih berkisar pada tataran pengetahuan dan sikap, belum memunculkan contoh-contoh praktek yang dijalankan selama ini.

April 2015	Januari 2016
<p>“Kalau dengan SKPD ya...kerjasamanya dalam bentuk kita turun secara bersama-sama, isu apa saja yang terjadi di masyarakat dibicarakan, kita bahas secara bersama-sama sesuai dengan bidang SKPD yang bersangkutan.”</p>	<p>“...dengan SKPD pasti...sebab mereka adalah mitra komisi kami... rapat kerja selalu kita sampaikan hasil temuan dan kita undang untuk turun bersasma-sama...”</p>

j. Rusdi (Anggota DPRD PNBK).

a) Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan

Dalam hal fungsi pengawasan, *mentee* menyatakan bahwa fungsi ini dijalankan untuk mengawasi pelaksanaan suatu peraturan daerah dalam kaitan pelayanan public, memastikan semua program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal upaya menyerap aspirasi masyarakat, *mentee* menyadari bahwa perlu untuk sering menadakan kunjungan lapangan ke konstituen untuk menyerap aspirasi. Dialog dengan konstituen sudah dilakukan baik dalam konteks reses maupun non-reses, tetapi masih belum terstruktur

agenda kunjungan dan bagaimana masukan dari kunjungan ke kelompok-kelompok konstituen secara programatik ditindak lanjuti.

Perubahannya adalah dalam fungsi legislasi, *mentee* sudah mampu memberikan penjelasan secara jelas proses penyusunan suatu peraturan daerah. Penjelasan masih sangat umum tidak muncul penjelasan rinci misalnya proses awal penyusunan naskah akademik atau bagaimana konsultasi publik dijalankan.

April 2015	Januari 2016
<i>“Fungsi pengawasan ya, ke SKPD... memastikan semua memang untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.”</i>	<i>“...memastikan bagaimana jalannya pemerintahan dapat baik dan sinkron dengan visi misi presiden...yaa... semuanya kan agar pro masyarakat dan masyarakat sejahtera...”</i>

b) Relasi dengan Media

Mentee menyadari peran media memang penting baik untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat maupun sebaliknya juga dapat berfungsi sebagai kontrol yaitu melalui pemberitaan tentang keluhan kelompok masyarakat. Dalam prakteknya *mentee* belum memiliki pendekatan khusus.

April 2015	Januari 2016
<i>“Kalau media itu sangat penting kalau ada kebutuhan - kebutuhan masyarakat yang perlu diprioritaskan supaya pemerintah itu cepat merespon yang mana yang harus diprioritaskan”.</i>	<i>“...media ini salah satu sumber masukan bagi kita... pemberitaan di masyarakat ada masalah seperti ini... tidak setiap saat anggota DPR ini mengecek lapangan... jika ada berita ini maka kita bisa lakukan kunjungan lapangan ke sana...”</i>

c) Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU

Secara umum *mentee* masih memandang bahwa pemberdayaan perempuan bukan sebuah fokus yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, fokus yang menembus batas komisi dan lembaga, *mentee* masih berpikir bahwa fokus ini adalah tanggung jawab lembaga tertentu.

Perubahannya, saat ini *Mentee* menganggap bahwa pemberdayaan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak. Upaya yang didorong oleh *mentee* saat ini dalam mendorong akses perempuan miskin dalam jaringan perlindungan social adalah melibatkan mengoptimalkan pendataan dengan komposisi tim pendata tokoh masyarakat, LSM dan tokoh pemuda agar pendataannya objektif.

Dalam pandangan *mentee*, untuk permasalahan kekerasan terhadap perempuan harus ada kebijakannya di tingkat kabupaten, sehingga upaya pencegahannya lebih baik. Disisi lain adalah peningkatan

ekonomi warga, sebab menurut mentee masalah kekerasan sering kali berasal dari permasalahan ekonomi.

April 2015	Januari 2016
<p>“Saya lihat kemarin itu kalau masalah perempuan ada di komisi IV itu, saya kan dari komisi II keuangan. Saya melihat program - program dalam komisi II itu keterpautannya adalah seperti dinas perikanan, peternakan, banyak itu alokasi anggarannya yang pro masyarakat miskin seperti bibit, bantuan untuk nelayan”.</p>	<p>“...mereka ini tidakmasuk karena datanya tidak ada... pendataan seharusnya dilakukan oleh tokoh masyarakat setidaknya 5 orang lah, LSM dan tokoh pemuda 5 orang... agar obyektif dalam menentukan mereka masuk dalam data atau tidaknya...”</p>

d) Integrasi program dengan pihak lain

Perubahan belum banyak terjadi. *Mentee* masih belum mampu menjelaskan bagaimana tindak lanjut ketika isu/topik yang muncul dalam kunjungan ke konstituen ternyata di luar sektor komisi tempat dia ditempatkan.

Interaksi dengan SKPD sebagai mitra kerja lebih pada ruang lingkup komisi yang bersangkutan. Tidak muncul penjelasan, misalnya bagaimana *mentee* membantu penyelesaian isu di luar sektor komisi yang bersangkutan dengan menghubungkan kelompok konstituen misalnya dengan SKPD yang bertanggung jawab terhadap isu tersebut sekalipun SKPD tersebut bukan mitra kerja utama. Saat ini mentee lebih banyak menjalin komunikasi dengan konstituennya dan cenderung bantuan teknis yang diberikan kepada konstituennya.

Sama halnya dengan SKPD, dalam wawancara, *mentee* menyatakan belum terbangun komunikasi yang baik dengan kalangan LSM. Mentee menyebut bahwa hubungan dengan LSM, baru dilakukan oleh LPP Bone.

April 2015	Januari 2016
<p>“...tapi tolong untuk media dan LSM itu tolong jangan memberitakan negatifnya saja harus juga memberitakan positifnya juga.”</p>	<p>“...berhubungan dengan LPP ada manfaatnya pak... bagaimana menyusun budgeting dan persamaan gender.”</p>

2. Perspektif Perwakilan SKPD

Potret kinerja APP/APL juga dijarah dari opini mitra kerja mereka di lingkungan eksekutif. Dengan menggunakan metode wawancara, dalam tahapan ini melibatkan 2 staf pemerintah daerah Kab.Bone sebagai narasumber yaitu Harum A.Hamid (Ka.Sub.Bag Umum dan Perlengkapan - Dinas Kesejahteraan Sosial) dan dr.Eko Nugroho (Ka.Bid Kesehatan Keluarga dan Masyarakat - Dinas Kesehatan). Dalam wawancara, pertanyaan diarahkan ke dalam 3 kelompok besar seperti diuraikan di bawah ini.

a) Komunikasi Politik

Interaksi dengan APP/APL masih bersifat formal. Kegiatan kunjungan ke lapangan tidak dilibatkan, lebih banyak pada pembahasan anggaran saja, demikian yang disampaikan oleh Eko Nugroho (Kabid Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bone).

Narasumber menyampaikan bahwa dalam pengawasan sudah mulai membaik dan responsif jika ada masalah langsung memanggil SKPD untuk melakukan hearing.

April 2015	Januari 2016
<i>“Kendala saat ini adalah tidak ada sinergi antara pemerintah dengan anggota legislative karena mereka kadang hanya mementingkan konstituennya saja bukan masyarakat universal” (Harum A.Hamid)</i>	<i>“...kalau saya tidak mas, kalau kepala dinas mungkin beberapa kali diajak serta oleh pimpinan dewan kalau kunjungan ke kecamatan...” (Eko Nugroho)</i>

Sementara menurut **Andi Gunawan** (Kasubag TU Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KPPPA Kabupaten Bone), bahwa paradigma APP/APL sudah mulai berubah. Saat ini sekarang hubungan sudah mulai ada perubahan paradigm, masyarakat sudah mulai menuntut bahwa janji-janji harus diterjemahkan sekarang, jadi sudah ada hasil yang baik, terutama masalah-masalah yang ada sudah diselesaikan untuk dapat dianggarkan

Narasumber menyatakan bahwa pada waktu kunjungan, APP/APL saat ini lebih banyak mendengarkan keinginan dari konstituen dan biasanya untuk anggaran tahun berikutnya akan dianggarkan, misalnya tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, demikian disampaikan narasumber. Isu atau topic yang dibahas dalam kunjungan ke lapangan lebih banyak adalah tawaran dari SKPD. Jadi lebih banyak masalah merupakan temuan dari SKPD untuk dibahas dalam pertemuan dengan konstituen maupun dalam pembahasan usulan perda.

b) Tata Kelola Aspirasi

Menurut narasumber, saat ini sudah ada peningkatan, yakni dengan adanya aspirasi dari masyarakat difabel yang diakomodir dan diperjuangkan oleh anggota APP/APL. APP/APL sudah melakukan pembahasan sebuah kebijakan menggunakan hasil dari serap aspirasi atau diskusi dengan masyarakat.

April 2015	Januari 2016
<i>“Hambatan saat ini adalah masih lemahnya kemampuan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kebutuhan pembangunan yang harusnya mereka dapatkan” (dr.Eko Nugroho)</i>	<i>“Saya melihatnya kalau ketemu di DPR kalau mereka bertanya biasanya bagian dari yang ditemukan di masyarakat... jadi saya rasa ada hubungan yang mereka dapatkan di masyarakat dengan kami di SKPD...” (dr.Eko Nugroho)</i>

3. Perspektif Kelompok Konstituen

Potret kinerja APP/APL juga dijangar dari opini kelompok konstituen yaitu kelompok masyarakat yang harus mereka wakili kepentingannya. Dengan menggunakan metode wawancara, dalam tahapan ini melibatkan 5 orang warga masyarakat secara umum, yaitu Nurhaedah (Ketua kelompok Konstituen Kel.Cellu), Sabeina (anggota PKK Desa Mallari-Awang Pone), Murni (warga desa Wollangi), Rosdiana (Kader pemberdayaan masyarakat desa Watu) dan Sanawiyah (warga kel.Makkamase) serta 3 orang sebagai perwakilan LSM di wilayah Kabupaten Bone yaitu Welly Pallawarukka (Forum Perempuan Bone Mandiri), Syamsul Rijal (LPMI) dan M. Djunaid Umar (LAPOR). Dalam wawancara, pertanyaan diarahkan ke dalam 3 kelompok besar seperti diuraikan di bawah ini.

c) Komunikasi Politik

Beberapa nama APP/APL yang disebut oleh masyarakat ketika diajukan pertanyaan terbuka siapa nama anggota DPRD yang mereka kenal, yakni Rusdi; Abdul Rahman (bukan mitra MAMPU); Andi Samsidar; Abulkhaeri; Mintayu Samsudin, Andi Taufiq.

Dalam pernyataannya para narasumber menyatakan bahwa tidak mengetahui secara langsung kinerja APP/APL. Narasumber (Kelompok Konstituen) menyatakan bahwa mereka ada yang dihubungi langsung oleh APL ketika akan ada pertemuan dengan konstituen namun ada juga yang hanya dihubungi oleh pihak desa. Meskipun secara kedekatan beberapa nama APP/APL diatas sudah cukup dekat dengan para narasumber.

Menurut para narasumber juga bahwa para APP/APL ini cukup sering mengunjungi mereka terutama ketika diundang dalam pertemuan konstituen. Dan lebih banyak menyerap (mendengarkan) aspirasi warga dari pada menyampaikan program-program mereka.

April 2015	Januari 2016
<i>“....kan ada Perda No.8 th.2008, disitu jelas diatur bahwa anggota dewan sebagai wakil rakyat wajib hukumnya hadir pada proses pra penjangaran aspirasi dihubungkan dengan hasil resesnya mereka”. (Syamsul Rijal)</i>	<i>“...dalam temu konstituen dia (Rusdi) melakukan sosialisasi tentang program dia... ini sudah dua kali... selain itu dia juga menyerap aspirasi warga untuk masalah akte kelahiran yang syaratnya tidak lengkap... disinikan banyak yang nikah siri...dia mengusulkan ke kantor capil...” (Nurhaedah)</i>

d) Tata Kelola Aspirasi

Para narasumber menyatakan bahwa APP/APL sudah memulai upaya menjangar masukan/aspirasi dari masyarakat. Pada saat studi awal, belum terlihat langkah-langkah konkrit untuk menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Saat ini, upaya serap aspirasi dari warga selama ini selain reses, juga dilakukan bersamaan dengan Musrenbang. Namun sering kali hanya ditampung saja belum dijadikan sebuah kebijakan yang dikeluarkan atau didorong oleh anggota dewan kepada eksekutif. Beberapa hal yang dilakukan oleh anggota dewan pasca serap aspirasi lebih sering membuat program/kegiatan yang bersifat teknis dan politis (tanpa kebijakan bersama dengan eksekutif), semisal yang dilakukan oleh salah satu APL yang mendampingi warga dalam menguruskan akte kelahiran atau APP yang mendampingi secara rutin kelompok perempuan ponceng kreatif, sebagaimana disampaikan di atas.

APP/APL telah cukup baik dan mengalami peningkatan dalam memerankan fungsi representasi melalui serap aspirasi. Pertemuan yang dilaksanakan oleh kelompok konstituen dihadiri oleh para APP/APL. Alasan utama para APP/APL bersedia hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh para kelompok konstituen adalah dalam pertemuan tersebut lebih “hidup” dan peran dialogis cukup baik. Hal ini juga tidak lepas dari peran LPP Bone sebagai mitra local dalam mengorganisir kelompok konstituen serta meningkatkan kapasitas para kelompok konstituen mengenai hak dan kewajiban anggota dewan maupun hak dan kewajiban warga selaku konstituen.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“...menurut saya mereka (anggota DPRD) sudah cukup aspiratif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, ya.... secara administratif sudah, yang secara praktis belum ada”.</i> (Sanawiyah)</p>	<p><i>“...pemandangan umum dan pendapat akhir sering dari kami... kebetulan saya mantan anggota DPR juga... dengan Golkar kalau mau pembahasan kadang kita kasih input... pembahasan apa saja...”</i> (Djunaidi Umar)</p>

4. Perspektif Kelompok Media

Potret kinerja APP/APL juga dijarah dari opini kelompok jurnalis untuk melengkapi perspektif dari para pegiat media massa. Dengan menggunakan metode wawancara, dalam tahapan ini melibatkan 3 orang sebagai narasumber, yaitu Rosdiana Sulza (Radar Bone), Edy Suspi (Tribun Bone) dan Ida Farida (Radio BIP). Dalam wawancara, pertanyaan dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar seperti diuraikan di bawah ini.

a) Komunikasi Politik

Narasumber media menyatakan bahwa dalam komunikasi dengan konstituen sudah relative baik dan dekat dengan konstituennya. Ketika ditanyakan apakah pernah dilibatkan dalam kegiatan APP/APL, dua dari tiga narasumber media menyatakan dihubungi meskipun tidak sering.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“...masih banyak masyarakat yang biasanya hadir dalam pertemuan dengan anggota dewan paling hanya tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda. Masyarakat dari ekonomi lemah jarang hadir”</i> (Rosdiana Sulza)</p>	<p><i>“...sebagian besar mereka ngontak kami... kalau ada waktu kami akan turun... memang di kantor kami memang ada pos penugasan... kebetulan yang di dewan bukan tugas saya... selain anggota dewannya kontak dari aparat pemerintahannya juga menghubungi....: (Rosdiana Sulza)</i></p>

b) Tata Kelola Aspirasi

Dalam pandangan jurnalis, beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat mulai langsung ada respon baik kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Kebijakan tidak tertulis yang disebutkan adalah respon untuk memanggil SKPD untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tindak lanjut paska hearing seringkali tidak tersampaikan ke media dan rapat pembahasan masih lebih sering bersifat tertutup. Contohnya kasus Raskin dan Jamkesda.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“....tidak hanya rencana kunjungan, tetapi harapan saya lebih banyak info dari mereka (APPAPL) tentang apa saja yang sudah mereka kerjakan”</i> (Ida Farida)</p>	<p><i>“...ada juga sih menjadi kebijakan... kebijakan hanya misalnya harus tertulis.. salah satunya begitu mendengar persoalan di masyarakat dia langsung panggil SKPD untuk hearing itu saja... (Rosdiana Sulza)</i></p>

Bab IV. Catatan Akhir

1. Kesimpulan

- a) Saat ini seluruh APP/APL mitra telah memiliki pemahaman dasar yang memadai. Untuk beberapa APP/APL mitra dengan perubahan signifikan (tabel hal.1), telah memiliki inisiatif individu untuk melakukan inovasi di luar mandat partai. Perubahan ini tampak terutama dari peningkatan baik dari sisi frekuensi maupun kualitas dalam berhubungan dengan konstituen dan mitra strategis lainnya (fungsi representasi) serta kemampuan dalam melakukan analisis anggaran. Untuk APP/APL pimpinan dewan maupun komisi peningkatan kualitas juga tampak dari kontribusinya dalam pansus (fungsi legislasi) dan sisi pengawasan ketika melakukan diskusi teknis dengan mitra SKPD.
- b) Untuk sebagian *mentee* lainnya (lebih dari 45%) dimana perubahan belum terlalu signifikan tampak bahwa hal ini dimungkinkan terjadi karena memiliki tantangan dalam menegosiasikan agenda komisi maupun parpol yang bersangkutan. Hal lain yang menyebabkan indikasi ini muncul karena
 - Periode dan metode pengamatan atau pengambilan data yang relatif singkat dan sederhana yaitu kurang lebih 2 jam wawancara untuk setiap APP/APL untuk program yang baru dilaksanakan 8 bulan. Relatif singkat bila dibandingkan dengan kompleksitas materi yang harus dijalankan, mulai dari fungsi anggota dewan sampai dengan gender dan kemiskinan.
 - Metode pendampingan yang dijalankan sangat variatif di masing-masing *mentee* mulai dari hanya melalui SMS sampai dengan diskusi secara langsung.
- c) Dalam kegiatan *mentorship* yang dilakukan masih belum sampai menyusun rencana kerja strategis setiap APP/APL mitra program terutama dalam konteks 5 tema utama program MAMPU. Beberapa materi masih disampaikan dalam tingkatan awal, misalnya fungsi legislasi belum sampai dengan pendampingan dalam melakukan review naskah akademik dan bagaimana diskusi publik dijalankan. Fungsi pengawasan belum sampai pada pertemuan verifikasi multi-pihak dan bagaimana konsekuensinya dari sisi kebijakan.
- d) Materi dalam silabus belum semua dikenalkan kepada para *mentee* secara intensif terutama materi-materi lintas sektoral misalnya gender dan kemiskinan. Namun beberapa *mentee* telah mengetahui beberapa isu terkait perempuan seperti isu gender dan tema MAMPU.
- e) Terdapat materi baru yang strategis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pijakan agar peran APP/APL lebih konkrit baik dari sisi fungsi formal keparlemenannya maupun hubungan dengan konstituen serta media yaitu implementasi UU Desa.
- f) Sebagian besar *mentee* telah memiliki perpektif partisipatif yang menganggap pentingnya pelibatan masyarakat dan perempuan dalam pembangunan, untuk didengar dan disuarakan. Hal ini ditunjukkan dengan lebih intensnya *mentee* membangun hubungan dengan masyarakat khususnya konstituennya, baik melalui pertemuan formal

seperti reses maupun insiatif pribadi untuk bertemu dengan masyarakat.

- g) Secara khusus untuk APP, sudah terlihat kemampuan *public speaking* dan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum maupun dalam sidang pembahasan di DPRD
- h) Peran LPP Bone sebagai mitra lembaga lokal sangat strategis terutama dalam konteks pendampingan *mentee* secara intensif. Di beberapa isu tampak sangat membantu APP/APL misalnya dalam relasi dengan konstituen dan analisis anggaran.

2. Rekomendasi

- a) Program *mentorship* ini perlu dilanjutkan mengingat beberapa perubahan awal yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan.
- b) Perlu penyesuaian metode dan periode pengukuran efektivitas program melalui analisa perubahan (*most-significant change*) secara lebih komprehensif.
- c) Perlu penyesuaian metode dan teknik pendampingan yang sejalan dengan silabus disesuaikan dengan isu terkini dan kebutuhan praktis APP/APL mitra misalnya dalam konteks pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.
- d) Sebaiknya intensitas dan metode pendampingan memiliki standar yang lebih terukur untuk masing-masing *mentee* di setiap materi sesuai silabus yang telah disusun di awal program.
- e) Perlu dipertimbangkan untuk pengembangan program *mentorship* dengan pendekatan kelembagaan partai mengingat tantangan untuk berinovasi datang dari garis hierarkhis kepartaian.
- f) Penyusunan konsep, strategi dan jadwal kerja berdasar subjek/topik setiap APP/APL mitra baik dalam kerangka fungsi formal keparlemenan, maupun dalam hal berhubungan dengan kelompok konstituen atau mitra strategis lainnya.
- g) Pengenalan kerangka logika pencapaian progam kerja secara terukur baik dari sisi waktu, kelompok sasaran maupun target pencapaian secara substantif.
- h) Menggunakan jalur media secara kreatif dimana tidak terbatas media *mainstream*. Misalnya dengan kunjungan individu APP/APL ke kantor media dengan agenda mendiskusikan isu tetentu.
- i) Optimalisasi kunjungan ke daerah pilihan melalui pola MSF (*multi stakeholder forum*) dimana melibatkan LSM, SKPD, akademisi serta kelompok masyarakat pada umumnya dengan tetap melibatkan jurnalis profesional.
- j) Temuan dan rekomendasi dalam baseline hendaknya melengkapi kegiatan identifikasi awal (*capacity building need assessment*) sebagai masukan dalam melaksanakan kegiatan mentorship sehingga memenuhi kebutuhan nyata APP/APL mitra program dalam melaksanakan fungsinya.
- k) Program *mentorship* dapat lebih optimal bila dalam pelaksanaannya dapat mengintegrasikan peran panel ahli yang memberikan materi utama dan lembaga mitra (misal: LPP Bone) sebagai pendamping APP/APL untuk mempraktekkannya dalam tugas keseharian.

Lampiran

Klasifikasi Pertanyaan K.A.P (*Knowledge, Attitude and Practices*)

Fokus	Pertanyaan	Kategori		
Mengidentifikasi pemahaman, persepsi dan praktek keparlemenan	Menurut pemahaman anda, apa yang dimaksud dengan “fungsi parlemen, prinsip parlemen dan konstituen”?	K		
	Menurut pemahaman anda, hal apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh anggota parlemen agar mampu menjalankan fungsinya?	K		
	Menurut anda, kapan seorang anggota parlemen dapat dikatakan sukses?		A	
	Menurut anda, faktor-faktor kunci apa sajakah yang menjadikan seorang anggota parlemen sukses?		A	
	Apakah anda merasa perlu mengembangkan kapasitas diri sebagai anggota parlemen? Alasannya?		A	
	Menurut anda, bagaimana sebaiknya seorang anggota parlemen berinteraksi dengan konstituennya?		A	
	Pengembangan diri apa sajakah yang sudah anda lakukan?			P
	Hambatan apa yang anda hadapi dalam melakukan pengembangan diri?			P
Relasi dengan media dalam menjalankan fungsi parlemen	Seberapa penting menurut anda membangun relasi dengan media sebagai anggota parlemen?		A	
	Menurut anda kriteria media seperti apakah yang strategis untuk mendukung fungsi sebagai anggota parlemen?	K		

	Bagaimana saat ini anda membina relasi dengan media?			P
	Media apa saja yang anda gunakan saat ini dalam menjalankan fungsi parlemen?			P
Pencapaian APP/APL dalam konteks 5 tema utama MAMPU	Secara ideal , hal apa saja yang sebaiknya anda lakukan terkait dengan isu utama program MAMPU?	K		
	Pada kenyataannya , hal apa saja yang telah anda lakukan terkait isu utama program MAMPU?			P
	Dengan berdasarkan kepada apa yang sudah dilakukan, apakah hasilnya sudah dinilai optimal (sesuai dengan harapan) Faktor apa yang menyebabkan kurang optimalnya hal diatas?			P
	Faktor apa sajakah yang menyebabkan ada beberapa hal yang dianggap ideal untuk dilakukan, namun belum dilakukan?			P
Cross sharing dan integrasi program diantara para APP/APL (yang sudah berlangsung dan/atau peluang untuk terjadinya hal tersebut)	Apakah anda melakukan kerjasama dengan anggota parlemen yang lain?			P
	Bagi yang melakukan kerjasama <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motivasi atau manfaat yang ingin didapatkan? ▪ Bentuk kerjasama yang dilakukan? ▪ Faktor apa sajakah yang menyebabkan kurang optimalnya manfaat yang didapatkan? ▪ Hambatan melakukan kerjasama dengan APP/APL lain? 			P

	<p>Bagi yang <u>belum</u> melakukan kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor apa kah yang menyebabkan tidak/belum dilakukannya kerjasama dengan APP/APL yang lain? ▪ Persepsi terhadap pentingnya dilakukan kerjasama dengan APP/APL lain, apakah kerjasama dengan APP/APL lain perlu/penting untuk dilakukan? Alasan ▪ Apakah ada peluang untuk melakukan kerjasama dengan APP/APL lain ke depan? 			P
--	---	--	--	----------

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Jl. H.A.Mappanyukki No 32, Makassar 90125

T. (62-411) 832228 / 833383, F. (62-411) 852416

www.bakti.or.id